



**LAPORAN
INSPEKTUR JENDERAL
RAPAT PEMUTAKHIRAN DATA TINDAK LANJUT HASIL
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA
TAHUN 2017**

BANDUNG, 11 DESEMBER 2017

YANG TERHORMAT :

1. BAPAK MENTERI DALAM NEGERI;
 2. WAKIL GUBERNUR SE INDONESIA;
 3. PARA INSPEKTUR JENDERAL KEMETERIAN/LEMBAGA;
 4. INSPEKTUR PROVINSI SE INDONESIA;
 5. PARA INSPEKTUR KABUPATEN/KOTA YANG HADIR
- BAPAK/IBU PESERTA RAPAT KERJA YANG BERBAHAGIA

ASSALAMU'ALAIKUM WR WB•

SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,
PERTAMA-TAMA MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR
KEHADIRAT ALLAH SWT KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-
NYA KITA BERSAMA DAPAT HADIR DALAM ACARA RAPAT
PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017•

**BAPAK MENTERI DALAM NEGERI YANG KAMI HORMATI
DAN PESERTA RAPAT YANG BERBAHAGIA**

PERKENANKAN KAMI MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT PEMUTAKHIRAN TLHP 2017, SEBAGAI BERIKUT:

DASAR HUKUM

PELAKSANAAN RAPAT PEMUTAKHIRAN TLHP 2017 DILAKSANAKAN SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI PASAL 8 DAN PASAL 373 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENGAMANATKAN BAHWA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL DIKOORDINASIKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI. • BENTUK KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DIMAKSUD, TERMASUK DI DALAMNYA PENGKOORDINASIAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH • RAPAT INI JUGA SEBAGAI TINDAK LANJUT PASAL 28 PP 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA YANG MEWAJIBKAN KEPADA APIP UNTUK MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA TLHP SETIAP TAHUNNYA. •

LATAR BELAKANG

PELAKSANAAN RAPAT DILATARBELAKANGI SEMANGAT UNTUK MENGEVALUASI HASIL PENGAWASAN DAN MENGINVENTARISASI HAMBATAN SERTA MERUMUSKAN LANGKAH PERBAIKAN YANG DIANGGAP PERLU DALAM PENGUATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. • ARTI PENTING TLHP, KARENA KEBERHASILAN SUATU PENGAWASAN BUKAN DILIHAT DARI SEBERAPA BANYAK REKOMENDASI YANG TELAH DIBERIKAN APIP, NAMUN SEBERAPA EFEKTIF REKOMENDASI TERSEBUT DITINDAKLANJUTI DAN MEMBERIKAN PERBAIKAN PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH. • PELAKSANAAN RAPAT

INI JUGA SEBAGAI FORUM KOMUNIKASI, KOORDINASI DAN SILATURAHMI ANTARA APIP PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH●

TUJUAN

PENYELENGGARAAN RAPAT INI BERTUJUAN UNTUK MENGHIMPUN DAN MEMETAKAN SELURUH HASIL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH APIP PUSAT DAN APIP DAERAH TAHUN 2017● DAMPAK YANG INGIN DIRAIH ADALAH TERBANGUNNYA PERSAMAAN PERSEPSI DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK SECARA TERUS MENERUS MENINGKATKAN KOMITMEN DALAM PENYELESAIAN TLHP DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH●

PESERTA

RAPAT DIKUTI OLEH INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN/LEMBAGA, WAKIL GUBERNUR SELURUH INDONESIA, INSPEKTUR PROVINSI SELURUH INDONESIA DAN INSPEKTUR KABUPATEN/KOTA, SERTA TIM PENGELOLA TLHP DARI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA● JUMLAH PESERTA YANG TELAH HADIR PADA KESEMPATAN INI BERJUMLAH SEKITAR 1.200 ORANG● HADIRNYA PARA WAKIL GUBERNUR SECARA LANGSUNG PADA RAPAT INI, MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI TUGAS WAKIL GUBERNUR SEBAGAI KOORDINATOR PELAKSANAAN TLHP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH, SESUAI DENGAN PASAL 27 PP 12 TAHUN 2017●

PELAKSANAAN

RAPAT AKAN DISELENGGARAKAN SELAMA TIGA HARI YAITU MULAI TANGGAL 11 SAMPAI DENGAN 13 DESEMBER 2017 DENGAN PENYELENGGARAAN BERSAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT. • UNTUK ITU KAMI MENGHATURKAN TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI TUAN RUMAH PENYELENGGARAAN RAPAT INI. •

DISAMPING PEMBAHASAN TLHP ANTARA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH, PADA KESEMPATAN INI, JUGA AKAN DISELENGGARAKAN DISKUSI PANEL UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS APIP DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, DENGAN NARASUMBER:

1. DEPUTI BPKP BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, DENGAN TOPIK "STRATEGI PENCAPAIAN TARGET SPIP DAN KAPABILITAS APIP LEVEL III TAHUN 2019" •
2. INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN SELAKU KETUA ASOSIASI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH, DENGAN TOPIK "PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL" •
3. KEPALA BIRO ORGANISASI KEMENDAGRI, DENGAN TOPIK "PROGRES PENGUATAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH"
4. DIRJEN BINA KEUANGAN DAERAH, DENGAN TOPIK "PENGANGGARAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2018" •

**BAPAK MENTERI DALAM NEGERI YANG KAMI HORMATI
BAPAK/IBU PESERTA RAPAT YANG BERBAHAGIA**

PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI JUGA AKAN DIBERIKAN PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA 12 (DUA BELAS) PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH BERKOMITMEN UNTUK MENINDAKLANJUTI SELURUH HASIL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKUKAN OLEH ITJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI SECARA TEPAT WAKTU, YAITU:

1. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH;
2. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT;
3. PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG;
4. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU;
5. PEMERINTAH PROVINSI BALI;
6. PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO;
7. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR;
8. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT;
9. PEMERINTAH PROVINSI RIAU;
10. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN; DAN
11. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN;
12. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT•

TERAKHIR, PADA KESEMPATAN INI JUGA AKAN DIRANGKAIKAN PENGUKUHAN FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR PROVINSI SE INDONESIA, YANG BARU TERBENTUK PADA TANGGAL 24 NOVEMBER 2017 DI MEDAN• FORUM INI KE DEPAN AKAN MENJADI MITRA PEMERINTAH DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

TERKAIT PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH●

BAPAK MENTERI DALAM NEGERI YANG KAMI HORMATI,

DEMIKIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT PEMUTAKHIRAN DATA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017● SELANJUTNYA KAMI MOHON PERKENAN BAPAK MENTERI UNTUK MENYAMPAIKAN SAMBUTAN SEKALIGUS MEMBUKA SECARA RESMI SERTA MEMBERIKAN PIAGAM PENGHARGAAN SECARA SIMBOLIS KEPADA 12 (DUA BELAS) PEMERINTAH PROVINSI YANG TELAH BERKOMITMEN MENYELESAIKAN TLHP DAN BERKENAN MENGUKUHKAN KEPENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR PROVINSI SE INDONESIA●

TERAKHIR, KAMI DARI PENYELENGGARA MOHON MAAF KEPADA BAPAK/IBU UNDANGAN MANAKALA TERDAPAT KEKURANGAN DALAM PENYELENGGARAN RAPAT KERJA KALI INI● SEKIAN DAN TERIMA KASIH●

WASSALAMU'ALAIKUM Wr. Wb.

PLT. INSPEKTUR JENDERAL,

SRI WAHYUNINGSIH